



---

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS KOPERASI, UMKM,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
MAMASA, PROVINSI SULAWESI BARAT**

Oleh:

**Nikita Paotonan**

Email : [Nikitapaotonan99@gmail.com](mailto:Nikitapaotonan99@gmail.com)

Pembimbing I:

**Muhlis Ruslan**

Email: [muhlisruslan@universitasbosowa.ac.id](mailto:muhlisruslan@universitasbosowa.ac.id)

Pembimbing II:

**Ahmad Jumarding**

Email: [jumarding.ahmad@universitasbosowa.ac.id](mailto:jumarding.ahmad@universitasbosowa.ac.id)

**Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen  
Universitas Bosowa Makassar**

**ABSTRACT**

*The purpose of the study was to find out how the financial performance of the Department of Cooperatives, MSMEs, Industry and Trade, Mamasa Regency, West Sulawesi Province in terms of the independence ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio. The research object was the Department of Cooperatives, MSMEs, Industry, and Trade, Mamasa Regency, West Sulawesi Province. The analytical tool used was the independent ratio analysis model, the efficiency ratio, and the effectiveness ratio. The research results can analyze the development of the level of independence of the Department of Cooperatives, MSMEs, Industry, and Trade of Mamasa Regency, West Sulawesi Province from 2017-2020 every year which tends to decrease every year, this is due to local revenue derived from market retribution income of Mamasa Regency which also continues to experience a decline. In the ratio of the effectiveness of the Department of Cooperatives, MSMEs, Industry, and Trade, Mamasa Regency, West Sulawesi Province, the contribution of the realization of regional original income is compared to the target to be achieved, which is more than 100%; thus the collection of regional original income is considered effective. And the efficiency ratio at the Department of Cooperatives, MSMEs, Industry, and Trade of Mamasa Regency, West Sulawesi Province from year to year is classified as inefficient, because the costs incurred to collect local revenue are very large compared to the realization of local revenue.*

-----  
**Keywords:** *financial performance, independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah berperan aktif untuk mengelolah dan membangun daerah sendiri, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah pasal 1 ayat 5 bahwa otonomi daerah merupakan hak dan wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal tetapi perlu juga adanya dukungan dari keuangan yang mampu memadai. Dilihat dari kemampuan kinerja keuangan yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah, pemerintah daerah dalam menggali anggaran daerah dapat dilihat dari hasil kinerja keuangan daerah. Pelaksanaan dari anggaran dan akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan.

Tujuan dari laporan pemerintah daerah yakni menerangkan data yang berguna pada saat mengambil keputusan pertanggungjawaban pemerintah daerah dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya agar dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Perihal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan. Analisis keuangan adalah suatu usaha dalam mengidentifikasi ciri-ciri keuangan mengikuti laporan keuangan yang telah tersedia. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mengukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dapat melihat pertumbuhan serta perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dikerjakan melalui metode membandingkan hasil suatu daerah dari satu rentang waktu dengan periode sebelumnya, alhasil dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Kinerja keuangan didasarkan pada pendapatan rencana individu ataupun organisasi. Bila kemampuan sesuai pada apa yang direncanakan, kemampuan berjalan dengan baik. Bila kemampuan melampaui rencana, bisa disebut kemampuan sangat baik. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya

dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi – potensi kinerja yang akan berlanjut. Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran kinerja yang memakai indikator keuangan. Kinerja akan selalu berbanding lurus dengan gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang dimaksud disini adalah Salah satu alat atau proses individu akan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum atau bersama ( Ahmad jumarding;Nurhidayanti S, 2020:148). Salah satu alat guna melaksanakan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah yakni analisis rasio pada APBD (Halim, 2008: 230).

Hasil penelitian Anhiantoko, Hony (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diwakili oleh Analisis Varians untuk pendapatan dan Belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja pendapatan belum baik sedangkan untuk kinerja belanja cukup baik. Kemudian Kinerja keuangan yang dilihat dari analisis pertumbuhan Aset, Ekuitas, dan Pendapatan, masing – masing akan mengalami peningkatan yang cukup baik diiringi dengan realisasi belanja yang juga meningkat dengan pertumbuhan kewajiban/hutang 0 (nol) %. Kinerja keuangan yang diamati pada analisis rasio keuangan menunjukkan hasil maka derajat desentralisasi pada SKPD ini perlu perhatian khusus, karena angka derajat desentralisasi yang sangat rendah sehingga kemampuan daerah terhadap penyelenggaraan daerah otonom yang sangat bergantung pada dana pusat, otomatis rasio rasio kemandirian daerahnya juga rendah dengan rasio ketergantungan daerah yang tinggi. Selain itu dalam hal efektivitas dan efisiensi pendapatannya kurang efektif dan efisien.

Hasil penelitian selanjutnya oleh Assidiqi (2014) menunjukkan kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemkab Klaten dilihat dari Varians Belanja Daerah Pemkab Klaten selama tahun 2008 – 2012, sehingga dikatakan baik dapat dilihat dengan rata – rata target realisasi APBD Kabupaten Klaten sebesar 93,48%. Secara umum memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat diketahui dengan melihat rata – rata pertumbuhan yang terjadi yaitu 11%. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dilihat dari keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat maka sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan ke

pembelanjaan operasi, dengan itu beberapa persen dialokasikan pembelanjaan modal. Selama tahun 2008 – 2012 rata – rata belanja Modal sebesar 9,57% sedangkan Belanja Operasi sebesar 90,33%. Sedangkan Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat dari efisiensi belanja daerah, realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Klaten tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Dengan hal tersebut menunjukkan Pemkab Klaten memenuhi target efisiensi belanja. Dengan berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.”

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Akuntansi pemerintah adalah sebagian bidang ilmu akuntansi telah mengalami perkembangan pesat, karena dengan ini adanya tuntutan agar pemerintah daerah diharapkan menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang transparan dan akuntabilitas serta dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun berbagai definisi tentang akuntansi pemerintah dari para ahli, menurut pandangan Tanjung (2008:35), definisi akuntansi pemerintahan daerah yaitu untuk proses penggolongan, pengiktsiran, dan pencatatan dengan cara spesifik pada transaksi, ukuran moneter, dan kejadian-kejadian keuangan yang bersifat umum dan juga termasuk hasil pelaporannya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan serta tugas pembantuan dan prinsip otonomi serta asas otonomi dengan luas pada prinsip dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Analisis keuangan merupakan salah satu usaha dalam mengidentifikasi ciri-ciri keuangan menurut susunan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio keuangan terhadap APBD dikerjakan dengan metode membandingkan hasil yang di capai oleh suatu daerah dari suatu periode terhadap periode sebelumnya, maka dari itu dapat di ketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio keungan APBD diharapkan bisa menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah

dan dapat melihat perkembangan serta pertumbuhan pendanaan pengeluaran dan pendapatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim 2002:231).

Kinerja adalah pencapaian seseorang atau pegawai yang memiliki hasil kerja serta dapat melaksanakan output, efisien, Efektivitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang dipertanggungjawabkan (Mangkunegara:2002:22). APBD adalah instrument anggaran bagi pemerintah daerah yang utama. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan Efektivitas pemerintah daerah. Analisis Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah dan berguna untuk mengetahui atau membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) merupakan salah satu bagian dari pembiayaan yang dimana dalam struktur APBD yang berbasis kinerja memungkinkannya terdapat SILPA pada akhir tahun anggaran atau periode. Keberadaan SILPA memungkinkan salah satu indikator Kinerja Keuangan APBD yang baik pada tahun anggaran bersangkutan. Kinerja keuangan APBD secara umum dapat dikatakan baik dapat dilihat dari, Kinerja Keuangan Belanja Daerah, pendapatan keuangan dari Kinerja keuangan, dan Kinerja Keuangan Pembiayaan Daerah sudah mencapai nominal yang ditargetkan. Apabila semua sudah mencapai target yang ditentukan maka pemerintah daerah dilihat dari kinerja keuangan APBD atau kinerja keuangan pemerintah daerah sudah dapat dikatakan baik dalam pengembangan dan pengelolaan daerahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2021. Dalam penelitian ini jenis data menggunakan jenis data kuantitatif. Penelitian ini memberikan gambaran secara aktual dan umum fakta pada fenomena yang sedang diteliti dibidang analisis Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan subjek Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan objek didalam penelitian ini yaitu Kinerja keuangan Dinas Perindustrian,Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Mamasa tahun 2018 – 2020.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yakni laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Mamasa Anggaran 2018-2020. Lalu, data primer yang langsung diperoleh dari subjek penelitian, penelitian dalam hal ini memperoleh data atau mendapatkan informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research) yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis rasio kemandirian, analisis rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rasio tingkat kemandirian Dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat**

Sumber pendapatan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa digolongkan ke dalam dua sumber pendapatan. Yaitu, pertama sumbernya dari realisasi pendapatan asli daerah dalam bentuk pendapatan retribusi pasar dan yang kedua pendapatan transfer yang bersumber dari APBN. Kemandirian suatu Dinas dapat diukur melalui berapa besar kemampuan sumber daya keuangan yang telah dikelolanya dapat dimanfaatkan secara baik dan dana yang di kelolanya mampu mencapai hasil yang maksimal. Analisis tingkat kemandirian Dinas tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rasio kemandirian yaitu dengan membandingkan total penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa dengan total jumlah penerimaan pendapatan Dinas tersebut.

Adapun rangkuman perhitungan anggaran pendapatan yang diperoleh Dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2017-2020.

**Tabel 1. Tingkat Kemandirian Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2020**

| Tahun Anggaran<br>(a) | Pendapatan Asli Daerah<br>(b) | Total Penerimaan<br>(c) | Rasio Kemandirian<br>(d) |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2017                  | 65.326.000                    | 9.980.606.900           | 0,65%                    |
| 2018                  | 52.670.000                    | 8.301.068.253           | 0,63%                    |
| 2019                  | 45.626.000                    | 8.720.021.943           | 0,52%                    |
| 2020                  | 28.122.000                    | 3.579.423.450           | 0,78%                    |

Sumber: Data Diolah 2021

Perkembangan tingkat kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa dari tahun 2017-2020 setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pendapatan retribusi pasar Kabupaten Mamasa yang juga terus mengalami penurunan. Keadaan membuktikan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa tahun 2017-2020 belum dapat dikategorikan mandiri dalam mengelola keuangan Dinas. Rasio kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa tahun 2017.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{65.326.000}{9.980.606.900} \times 100\% = 0,65\%$$

Tingkat kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa pada tahun 2017 adalah 0,65%. Nilai rasio kemandirian dalam penunjukkannya sampai tingkat kemandirian atau kemampuan keuangan Dinas masih sangat rendah. Maka dapat dikatakan bahwa Dinas ini tetap bergantung kepada pemerintah pusat (APBN). Rasio kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa 2018.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{52.670.000}{8.301.068.253} \times 100\% = 0,63\%$$

Tingkat kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa pada tahun 2018 adalah 0,63%. Nilai rasio

tersebut juga masih menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Dinas jua tergolong masih rendah dan masih berantung kepada pemerintah pusat (APBN). Rasio kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa 2019.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{45.626.000}{8.720.021.943} \times 100\% = 0,52\%$$

Tingkat kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa pada tahun 2019 adalah 0,52%. Nilai rasio tersebut menghadapi penurunan yang cukup besar dari tahun lalu, yakni sebesar 0,11%. Ini masih jelas menentukan pada tingkat kemandirian keuangan Dinas masih sangatlah rendah dan tergantung kepada pemerintah pusat (APBN). Rasio kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa 2020.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{28.122.000}{3.579.423450} \times 100\% = 0,78\%$$

Kemudian untuk tahun 2020, tingkat kemandirian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa adalah 0,78%. Nilai rasio tersebut mengalami kenaikan 0,26% dari tahun sebelumnya. Tapi tetap saja menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Dinas ini masih sangat rendah dan masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat (APBN).

### **Rasio Tingkat Efektivitas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Mamasa**

Efektivitas pendapatan asli daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa adalah penggambaran pemerintah daerah dalam kemampuan dalam perealisasi atan asli daerah yang sudah rencanakan. Analisis perhitungan tingkat efektivitas menggunakan rasio efektivitas adalah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Mamasa dengan target penerimaan pendapatan asli daerah.

Kemampuan dalam menjalankan tugasnya oleh pemerintah daerah dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai nominal 100%



semakin tinggi rasio efektivitas dapat diartikan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik.

**Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2020**

| Tahun | Realisasi Penerimaan | Target Penerimaan | Rasio Efektivitas |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|
| (a)   | (b)                  | (c)               | (d) = (b) / (c)   |
| 2017  | 65.326.000           | 52.670.000        | 117%              |
| 2018  | 45.626.000           | 28.122.000        | 126%              |
| 2019  | 56.000.000           | 41.837.333        | 85%               |
| 2020  | 53.522.000           | 18.135.000        | 155%              |

Sumber : Data Diolah 2021

Dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi pendapatan yang diperoleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2020 mengalami kenaikan dan penurunan, selain itu pada jumlah realisasi penerimaan dan target penerimaan setiap tahun juga mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio efektivitas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah berada pada angka 85% sampai 155%. Hal ini memberikan gambaran bahwa Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa sudah cukup efektif dapat dilihat dari pendapatan daerah dalam melakukan pemungutan sumber dalam bentuk retribusi pasar. Penyebab hal ini dikarena realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2017 rasio efektivitas dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa mencapai lebih dari 100%, yakni sebesar 117%. Dari hasil ini berarti dapat dikatakan bahwa efektivitas kinerja keuangan berjalan dengan efektif. Di tahun berikutnya yaitu tahun 2018, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa mencapai hasil yang lebih baik lagi dengan rasio efektivitas sebesar 126%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas berjalan lebih efektif dari tahun sebelumnya.

Namun di tahun 2019 rasio efektivitas dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa mengalami besaran penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 85%. Di tahun ini memberikan gambaran bahwa kinerja keuangan Dinas kurang efektif. Sedangkan di tahun 2020 rasio efektivitas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 155%. Menunjukkan bahwa di tahun 2020 kinerja keuangan Dinas sangat efektif.

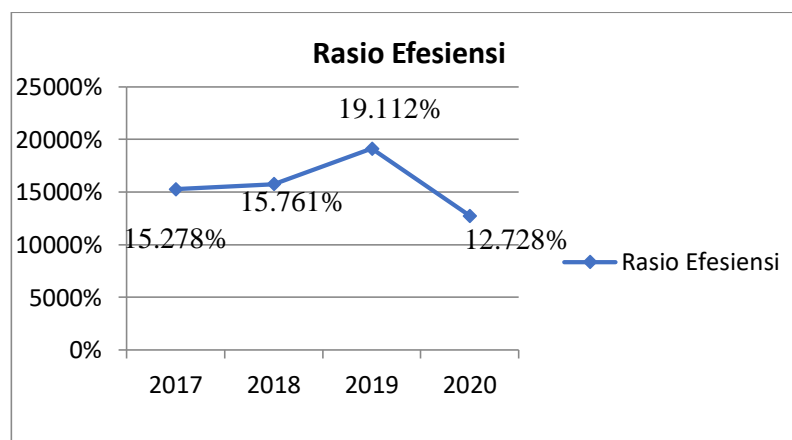
#### **Rasio Tingkat Efisiensi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa**

Efisiensi pendapatan asli daerah dapat digambarkan dengan membandingkan berdasar besarnya pengeluaran pembiayaan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah melalui kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Mamasa yaitu kegiatan berupa kegiatan pembangunan pada bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi. Adapun rincian keuangan yang menjadi pengeluaran biaya untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah yang berupa retribusi pasar.

Pada tahun 2017 jumlah realisasi pendapatan asli daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 65.326.000. Sedangkan biaya pungut atau biaya yang digunakan untuk memperoleh retribusi pasar sebesar Rp. 9.980.606.900, dimana hasil jumlah jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah, sehinggadapat dinilai kurang efisien. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018, realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan, begitupun dengan biaya pungutnya. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 52.670.000 dan biaya pungut atau biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan retribusi pasar sebesar Rp. 8.301.068.253. Ini menunjukkan bahwa Dinas ini masih kurang efisien dalam pengelolaan keuangannya dan masih sama dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 45.626.000 dan biaya pungut sebesar Rp. 8.720.021.943. maka dapat dilihat pada tingkat efisiensi pengelolaan keuangan masih kurang efisien sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2020, realisasi pendapatan asli daerah dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp.28.122.000. Biaya pungut atau biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan retribusi pasar juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 3.579.423.450, dimana jumlahnya tetap besar melebihi perbandingan pada pendapatan asli daerah, sehingga dapat dinilai masih kurang efisien.

**Grafik 1. Perkembangan Tingkat Efektivitas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2017-2020**



Grafik di atas menunjukkan gambaran perkembangan kinerja efisiensi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa yang kurang baik apabila dilihat dari nilai pengeluaran yang dialokasikan sebagai pengeluaran biaya pemungutan pendapatan asli daerah, karena rasio efisiensinya sangat besar yaitu berkisar antara 12.728% sampai dengan 19.112%.

Dari grafik tersebut terlihat jelas bahwa rasio efisiensi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa dari tahun 2017 sampai 2019 semakin tinggi dan jauh di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah realisasi pendapatan asli daerah yang diterima oleh Dinas sangat kecil

dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan, yakni sebesar 12.728% tapi tetap saja kinerja keuangan Dinas masih tidak efisien. Tingkat efisiensi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa diukur menggunakan perbandingan antara pengeluaran biaya pada realisasi pendapatan asli sebuah daerah, sehingga nilai rasio yang muncul memberikan nilai yang tidak positif pada tingkat efisien kinerja keuangan, hal ini disebabkan pembiayaan yang keluar jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang telah diperoleh.

**Tabel 3. Nilai Perkembangan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Mamasa Tahun 2017 -2020**

| Tahun                                    | Rasio Kemandirian (%) | Rasio Efektivitas (%) | Rasio Efisiensi (%) |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2017                                     | 0,65                  | 117                   | 15.278              |
| 2018                                     | 0,63                  | 126                   | 15.761              |
| 2019                                     | 0,52                  | 85                    | 19.112              |
| 2020                                     | 0,78                  | 155                   | 12.728              |
| <b>Total</b>                             | <b>2,58</b>           | <b>483</b>            | <b>62.879</b>       |
| <b>Rata-rata Rasio*</b>                  | <b>0,65</b>           | <b>121</b>            | <b>15.720</b>       |
| Rasio Tertinggi                          | 0,78                  | 155                   | 19.112              |
| Rasio Terendah                           | 0,52                  | 85                    | 12.728              |
| <b>Rasio Peningkatan<br/>Pertahun **</b> | <b>0,07</b>           | <b>17,5</b>           | <b>1.596</b>        |

\* rasio rata-rata = total rasio dibagi dengan jumlah tahun

\*\* rasio peningkatan = pengurangan antara rasio tertinggi dengan rasio terendah dibagi jumlah tahun

Sumber : Data Diolah 2021

Tabel tersebut yakni perolehan hasil didasarkan pada uraian rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi, dimana rata-rata dari ketiga rasio tersebut di atas menunjukkan nilai yang berbeda. Penilaian tersebut diambil didalam data-data pendapatan asli daerah yang merupakan hasil dari perbandingan total setiap rasio dengan jumlah tahun yaitu dari tahun 2017-2020. Untuk penilaian rasio peningkatan pertahun, nilai rasio tersebut merupakan perbandingan

antara pengurangan rasio tertinggi terhadap jumlah tahun yaitu dari tahun 2017-2020.

### **KESIMPULAN**

Rata-rata pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui hasil retribusi pasar terhadap total pendapatan daerah masih jauh dari kata sempurna, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat rasio kemandirian dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan otonomi keuangan daerah masih belum mampu. Pemungutan pendapatan asli daerah dinilai efektif, karena kontribusi dari realisasi pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan target yang harus diperoleh, yaitu lebih dari 100%. Pemungutan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamasa dari tahun ke tahun tergolong tidak efisien, karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah.

Stakeholder terkait sebaiknya lebih kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan lebih menggali alternatif pengembangan potensi daerah yang sudah ada dan potensi baru yang dapat dikelola. Pemerintah daerah sebaiknya meminimalisir pengeluaran disamping meningkatkan pendapatan asli daerah. Lalu, mereka sebaiknya menunjukkan biaya pemungutan atau pengeluaran yang lebih dengan cara spesifik serta memberikan pengertian yang lebih rinci tentang biaya-biaya yang dikeluarkan.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad jumarding,Nurhidyanti.2020. Analisis Gaya Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Karyawan di Direktorat Pembinaan Pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arum Wijayanti. 2011. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian Perdagangan Energi, dan Sumber Daya Mineral Kota Batam
- Bastian,Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.Suatu pengantar*. Jakarta :Erlangga
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan. Indeks : Jakarta
- Halim, Abdul. (2002). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta:
- Halim, Abdul.2008. Auditing (Dasar – dasar Audit Laporan Keuangan), Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia.Remaja Rosdakarya : Bandung
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta :Andi Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UUP STIM YKPN : Yogyakarta
- Moehar. 2002. Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Jakarta : Bumi Aksara
- Nordiawan.(2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. 2004. UU RI No.32. Tentang 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara
- Tanjung Hafisz Tanjung. 2008. *Akuntansi Pemerintah Daerah & Konsep Aplikasi (Sesuai standar Akuntansi Pemerintah )*.Bandung:Alfabeta